

Rudy Hendra Prasetya

19870527 200911 1 001

Data Analytics – Batch 2

BAB I

DATA UMUM OBJEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Optimalisasi PAD

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Kemudian, dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tak hanya diberi kewenangan dalam kebijakan belanja daerah, namun juga kewenangan dalam memungut pajak.

Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD sangat bergantung pada kapasitas institusional dalam tata kelola dan optimalisasi PAD. Penguatan tata kelola

PAD dapat berupa penguatan peraturan dan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, utilisasi teknologi informasi, pengendalian internal, dan manajemen risiko.

B. Informasi Hasil Pengawasan Optimalisasi PAD

Informasi Hasil Pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan dalam tema Optimalisasi PAD adalah *pattern* pencapaian PAD pemda dan faktor apa yang melatarbelakangi *gap* anggaran dan realisasi. Pelaksanaan APP OPAD pada Direktorat 301 Akuntabilitas Pemerintahan Daerah sampai pada tahap finalisasi pedoman. Perwakilan BPKP akan melaksanakan pengawasan APP OPAD mulai minggu kedua Mei 2022. Enam informasi hasil pengawasan APP OPAD adalah sebagai berikut:

1. Potret kebijakan pemda dalam manajemen PAD
2. Ketepatan penetapan target PAD dibandingkan potensinya
3. Potret tren realisasi PAD (analisis per jenis PAD dan sektoral)
4. Capaian Realisasi dibanding Target
5. Identifikasi hambatan dalam pengumpulan PAD
6. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi.

Identitas objek pengawasan APP OPAD untuk insilwas 1, 3, 4, 5, dan 6 adalah 542 pemda. Sedangkan objek APP OPAD untuk insilwas nomor 1 – 6 adalah 68 pemda (2 pemda tiap perwakilan).

Untuk menjawab informasi hasil pengawasan (insilwas) di atas, penulis telah mengajukan internalisasi konteks antar tingkat pemerintahan, karakteristik tiap jenis Pajak Daerah, dan dimensi waktu pra-, ketika, dan pasca- pandemi (2017 – 2019; 2020; dan 2021).

Pada saat laporan ini ditulis, progress manajemen data APP OPAD adalah sebagai berikut:

1. FGD mekanisme pedoman pengawasan dengan analisis data LKPD 542 Pemda: Anggaran – Realisasi tahun 2017-2021

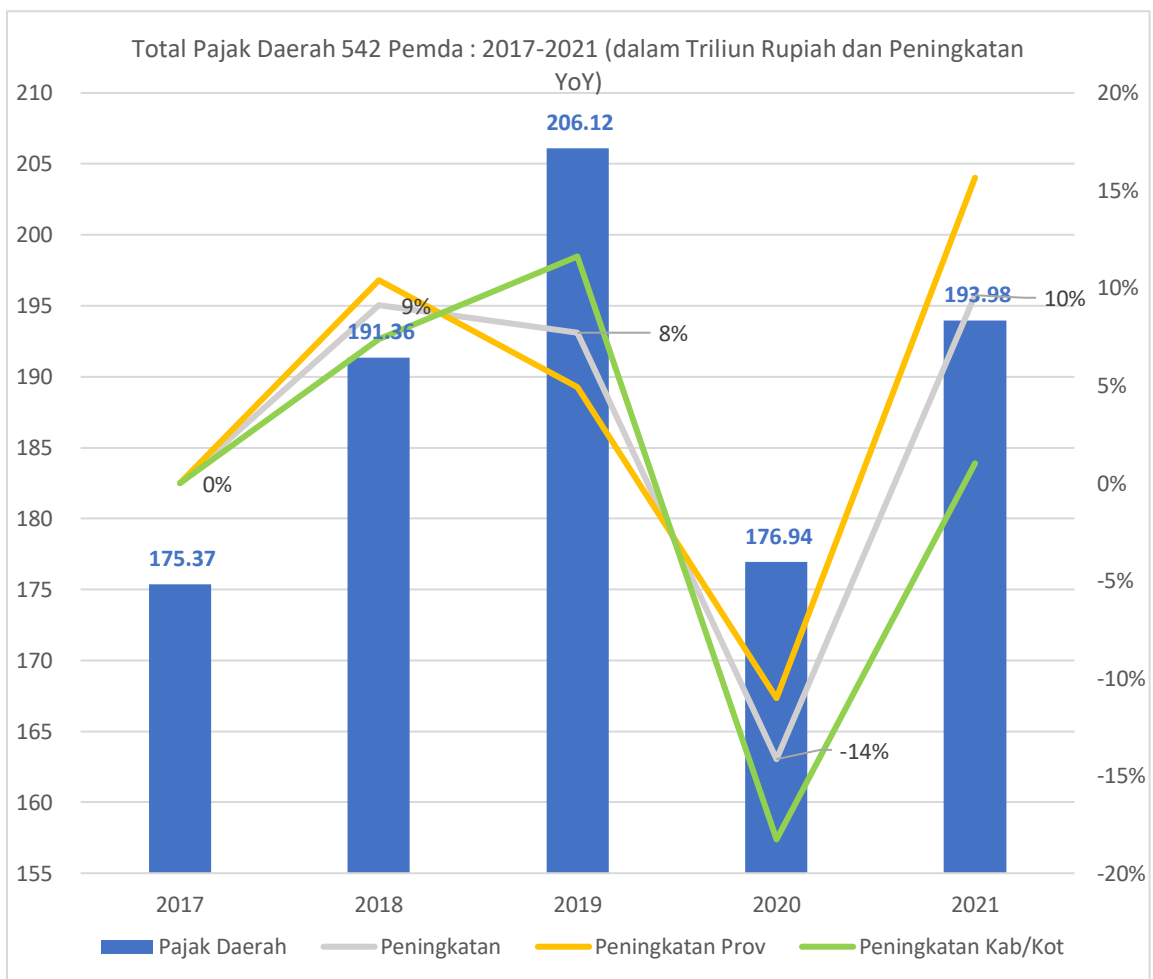
2. Finalisasi penyebaran kuesioner *self assessment* oleh pemda¹,
3. Finalisasi *dashboard* profil PAD per pemda melalui fitur PAD di Siera PAPBJ (sedang dalam proses input data di Dir 301).

¹ Kuesioner Self Assessment PAD Pemda - Draft
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HeSJPyk00AMkJtL_xYcl3WL2583QQZlisPNfeK-ZM4/edit?usp=sharing

BAB II

ANALYTICS: FROM DATA TO INSIGHT

A. DATA, DATA, DATA



Sumber: DJPK, 2022 (diolah menggunakan Ms. Excel dan Power Pivot)

Pertumbuhan PAD 542 Pemda dalam rentang 2017 – 2021 mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan PAD di tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi adalah 8 dan 9 %. Kemudian realisasi PAD naik sebesar 10% di 2021 setelah turun 14% pada tahun sebelumnya. Sekilas terlihat pertumbuhan PAD di tahun 2021 cukup menjanjikan, namun jika dianalisis lebih dalam berdasarkan tingkat pemerintahan dan

perolehan Pajak Daerah, Pertumbuhan realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 hanya sebesar 1% setelah mengalami penurunan signifikan sebesar 18% pada tahun 2020.

Selain itu, terdapat jenis Pajak Daerah yang sangat *volatile* terhadap krisis ekonomi di tahun 2020 karena sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi perkotaan (*urban biased*). Hal tersebut tercermin dari penurunan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pada 2020 menyebabkan penurunan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak/Retribusi Daerah lain terkait. Hal ini semakin jelas pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Atas hal tersebut, pertanyaan esensial dalam Pendapatan Asli Daerah adalah yang sepatutnya dijawab:

Apa yang menyebabkan deviasi anggaran – realisasi PAD pada tiap Pemda?

Untuk menghasilkan insilwas, analisis data harus menggunakan konteks setting institusi, kemungkinan *gamesmanship* pemda (dan lebih mikro, agen PAD), dan *taxpayer burden cost to comply*.

B. THE MEASURABLE AND THE UNMEASURABLE

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai manajemen PAD di Indonesia, analisis dilakukan dalam dua dimensi: agregat se-Indonesia dan analisis *micro behaviour* pada level pemda. Untuk analisis keseluruhan pemda, Rendal dapat melakukan analisis data panel (atau *logistic regression model estimates*). Sedangkan analisis behaviour dan manajemen PAD pemda dapat digali lebih mendalam oleh tim Perwakilan. Hasil dari keduanya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan makro dibandingkan hasil dari pengawasan tahun-tahun sebelumnya yang lebih bersifat operasional. Melalui kajian tiap pemda Berdasarkan data anggaran dan realisasi

PAD 542 dalam 2017 – 2021, data profil pemda, indikator makro (PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, dan data setting institusi) Rendal dapat menganalisis faktor apa yang menjelaskan disparitas akuntabilitas PAD pada pemda di Indonesia.

$$Accntblty_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDPpc_{i,t} + \beta_2 \ln GDPpc_{sqi,t} + \beta_3 IPM_{i,t} + \beta_4 Gini_{i,t} + \beta_5 Ins_{i,t} + \varepsilon_i \quad (1)$$

Di mana i menandakan pemerintah daerah i ($i = 1, 2, \dots, 542$), t untuk tahun ($t = 1, 2, \dots, 5$), $GINI$ merepresentasikan koefisien Gini tiap pemda, Ins untuk *composite index* setting institusi tiap pemda. Sebagai *controled variables*, $\ln GDPpc$ dan $\ln GDPpcsq$ untuk natural log PDRB per kapita dan *squared term*-nya, IPM untuk Indeks Pembangunan Manusia, Ins untuk *composite index* sinstitusi dari *conformity index* pemda dalam SPIP, MRI, Opini LKPD, skor SAKIP and ε_i yang menandakan error term.

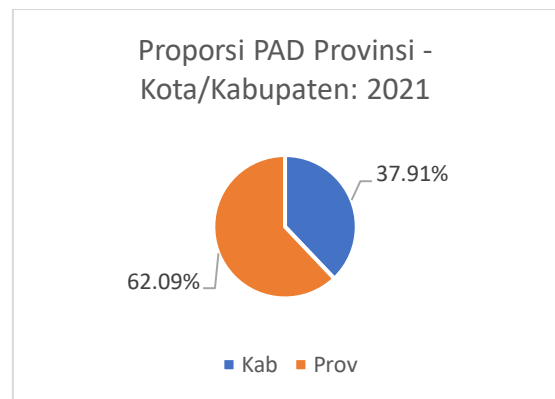
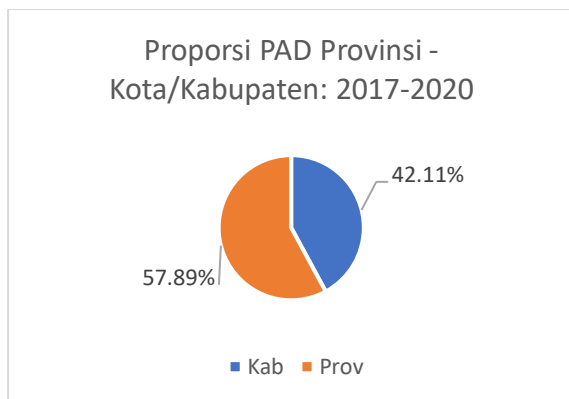
Dalam analisis tiap Pemda, Rendal melakukan reformasi pedoman yang lebih relevan dengan insilwas dan audit questions. Sebagai best practices, hasil analisis yang dapat dicapai oleh tim perwakilan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Relevan dengan tujuan PAD sebagai sumber pendapatan yang sustainable di masa mendatang
2. Relevan dengan indikator dan *symptoms* kondisi makro dan strategis
3. *Not losing the big picture* – tidak terjebak dalam kondisi operasional
4. *Storytelling and hard figures is a must*

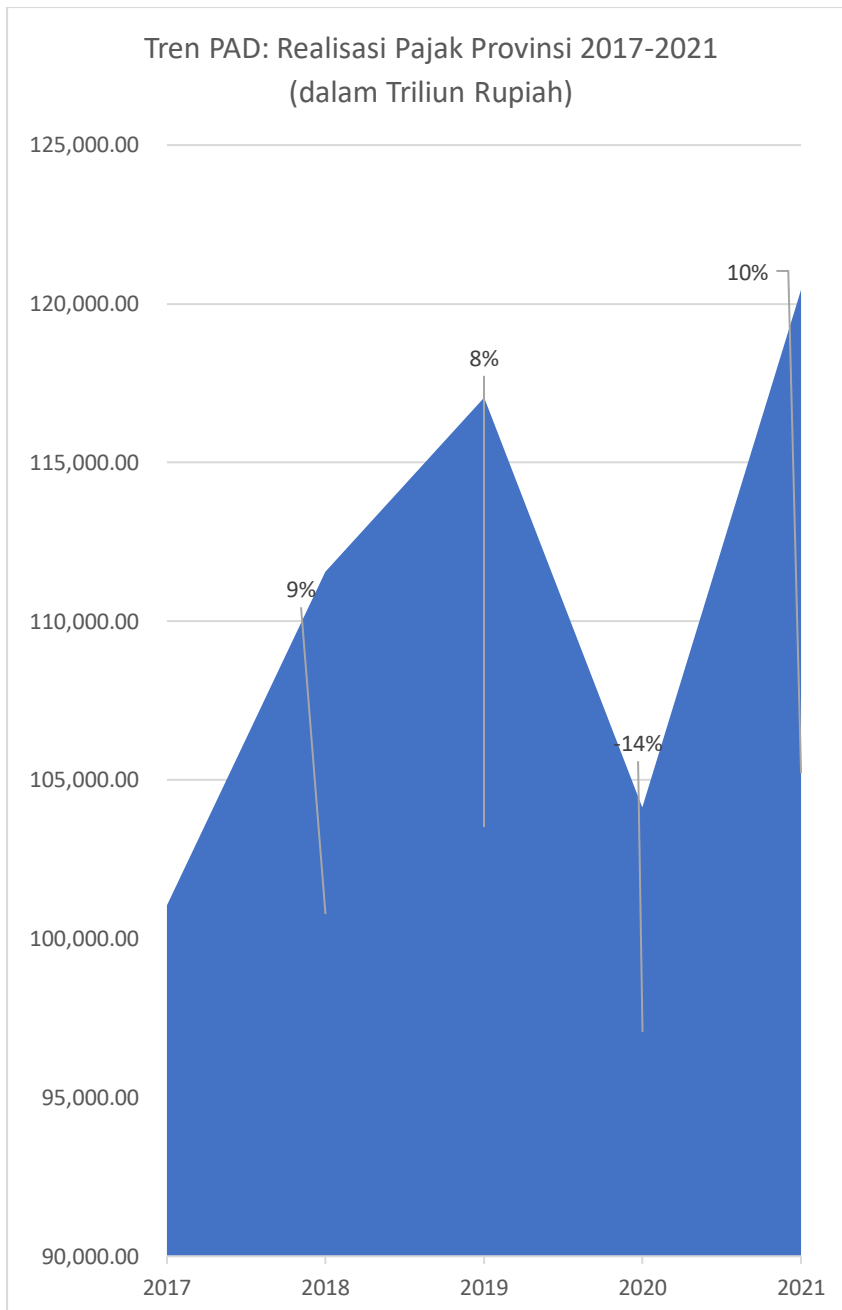
C. EXISTING CULTURE IN BPKP

D. HASIL ANALISIS DATA

1. Pemerintah Provinsi Lebih *Resilient* daripada Pemerintah Kabupaten/Kota ketika (dan pasca-) Pandemi



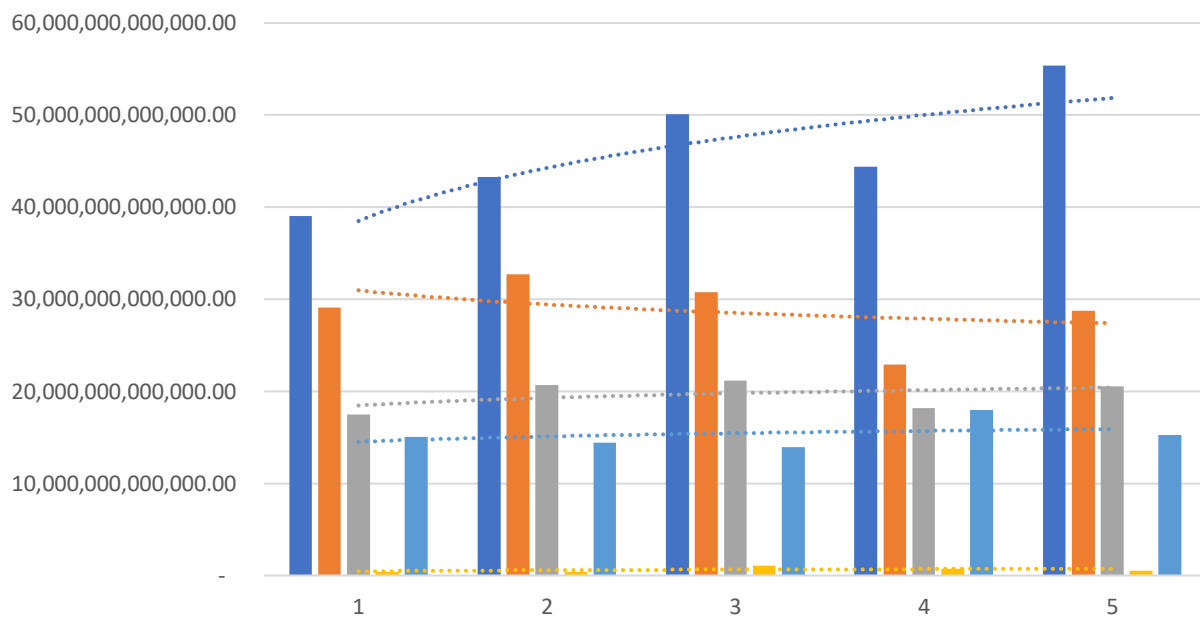
Terdapat pergeseran komposisi PAD Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada 2017-2020, rerata PAD Kabupaten Kota sebesar 42% (41-43%). Namun, selama pemulihan ekonomi di tahun 2021, komposisi PAD Kabupaten/Kota hanya sebesar 38%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Jenis Pajak pada Provinsi yang cenderung inelastis dibandingkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dua jenis Pajak Daerah andalan Pemprov. Meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan, tren Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat meskipun pandemi di 2020. Hal ini mungkin menjelaskan kenaikan pembelian kendaraan bermotor untuk memitigasi transmisi virus di transportasi umum. Hal ini juga dapat menjadi acuan kebijakan publik dalam pengadaan transportasi umum dan leasing kendaraan bermotor secara makro.



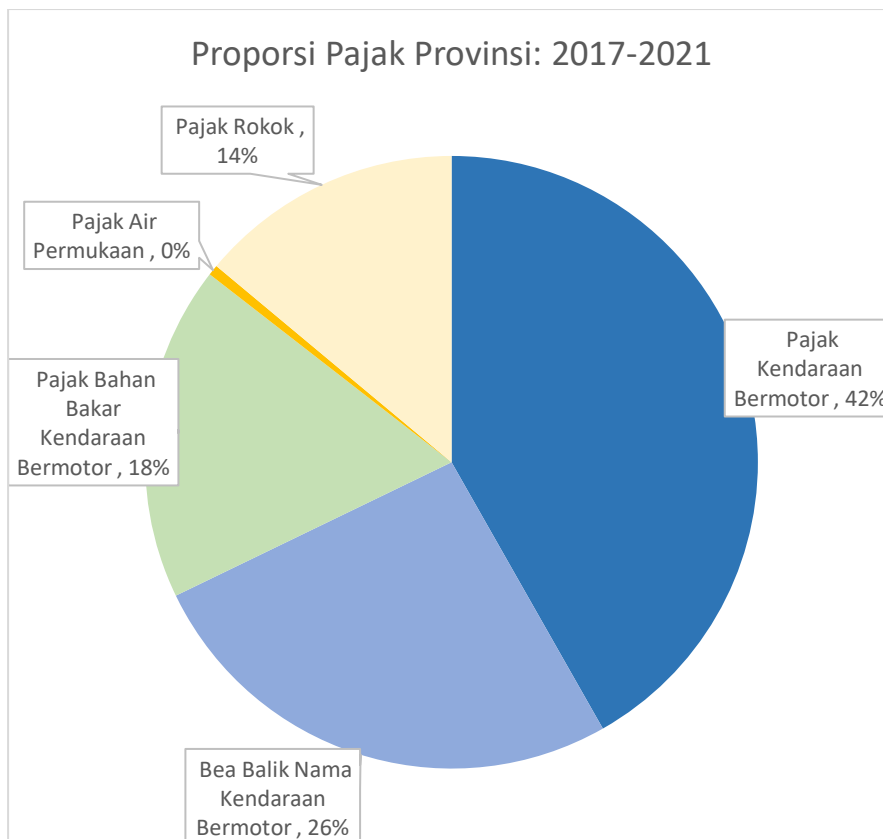
PAD Provinsi mengalami fluktuasi akibat pandemi, tetapi **Proporsi per Jenis Pajak tidak berubah**. Sudah menunjukkan pemulihan.

- Pada 2020, realisasi Pajak Provinsi mengalami penurunan 14%
- Pada 2021, pemulihan Pajak Provinsi sebesar 10% *yoy* dan 2,4 T lebih besar daripada 2019.
- Sementara itu, proporsi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan tidak cenderung konsisten baik sebelum pandemi dan pascapandemi.
- Realisasi Pajak Air Permukaan 2019 meningkat 77% dari tahun sebelumnya. – indikasi intensifikasi yang sangat potensial. Kenapa ada pemda yg njengat dan ada yang tidak? Kendala dan potensi dalam Bisnis proses Penetapan dan Pemunugutan pajak Air?

Chart Title



- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Log. (Pajak Kendaraan Bermotor)
- Log. (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
- Log. (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
- Log. (Pajak Air Permukaan)
- Log. (Pajak Rokok)

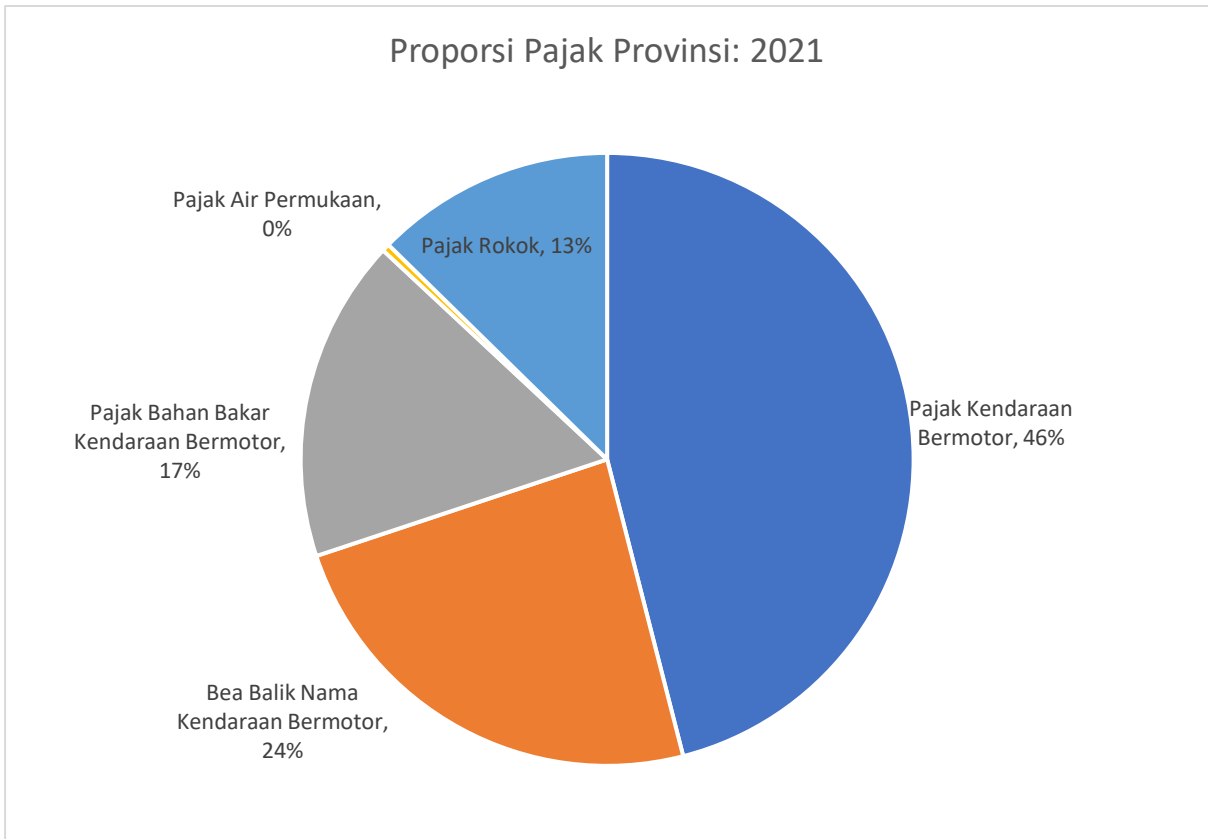
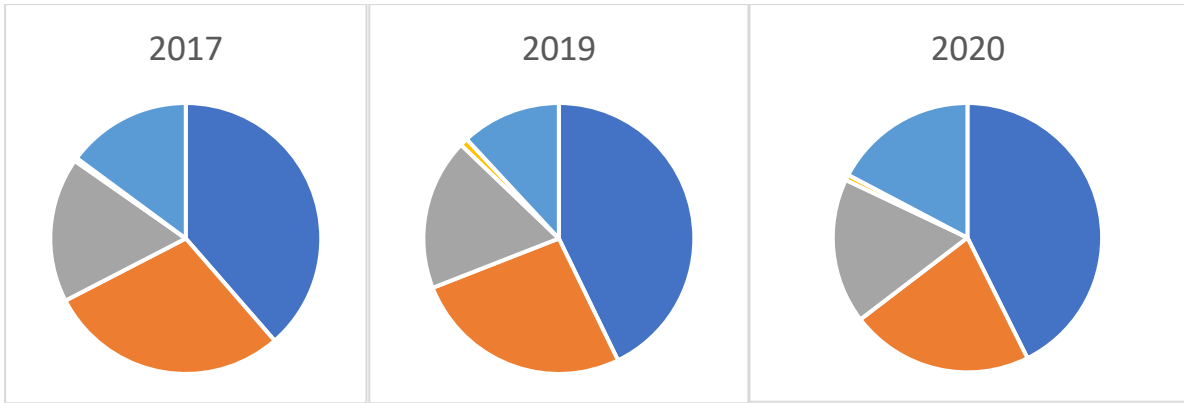


Urutan Jenis Pajak terbesar di Provinsi (rerata 2017-2021):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (42%)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (26%)
3. Pajak Bahan Bakar Bermotor (18%)
4. Pajak Rokok (14%)
5. Pajak Air Permukaan (di bawah 1%)

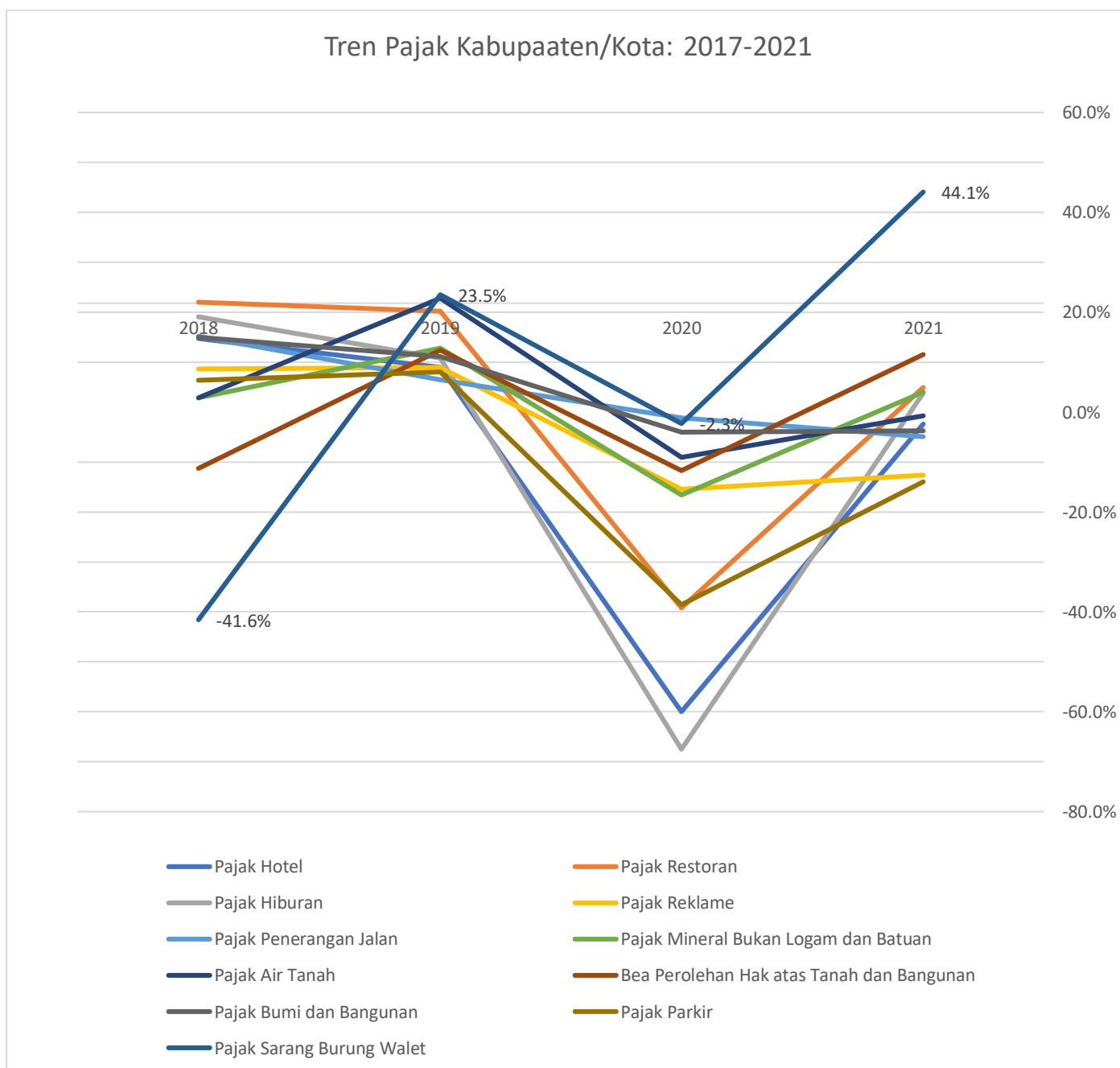
Jenis Pajak 1 dan 2 dapat dioptimalisasi dengan peningkatan kolaborasi dengan Kepolisian RI. Dengan inovasi pembayaran, *compliance cost* masyarakat akan lebih rendah dan diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Informasi Tambahan: Tidak ada perubahan signifikan dalam komposisi Pajak Provinsi, sbb



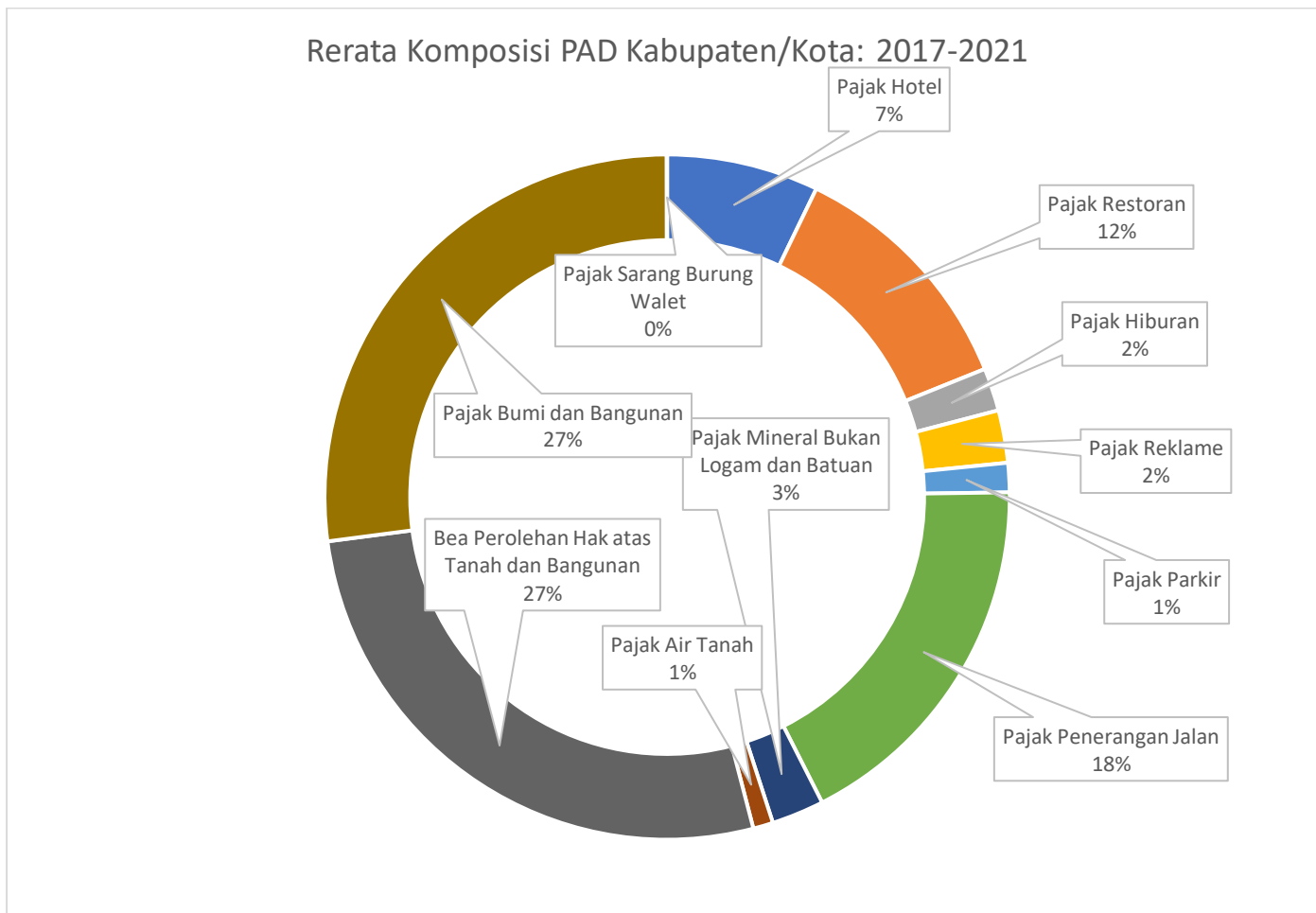
Pajak Kabupaten/Kota

2. Anomali: Pajak Penerangan Jalan yang tidak kunjung meningkat meskipun Jenis Pajak lain telah meningkat selama pemulihan pandemi



Pajak Sarang Burung Walet meningkat 23% pada 2019, menurun 60% di 2020, dan kembali ke nilai semula di tahun 2021. Terdapat indikasi potensi yang besar melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek Pajak.

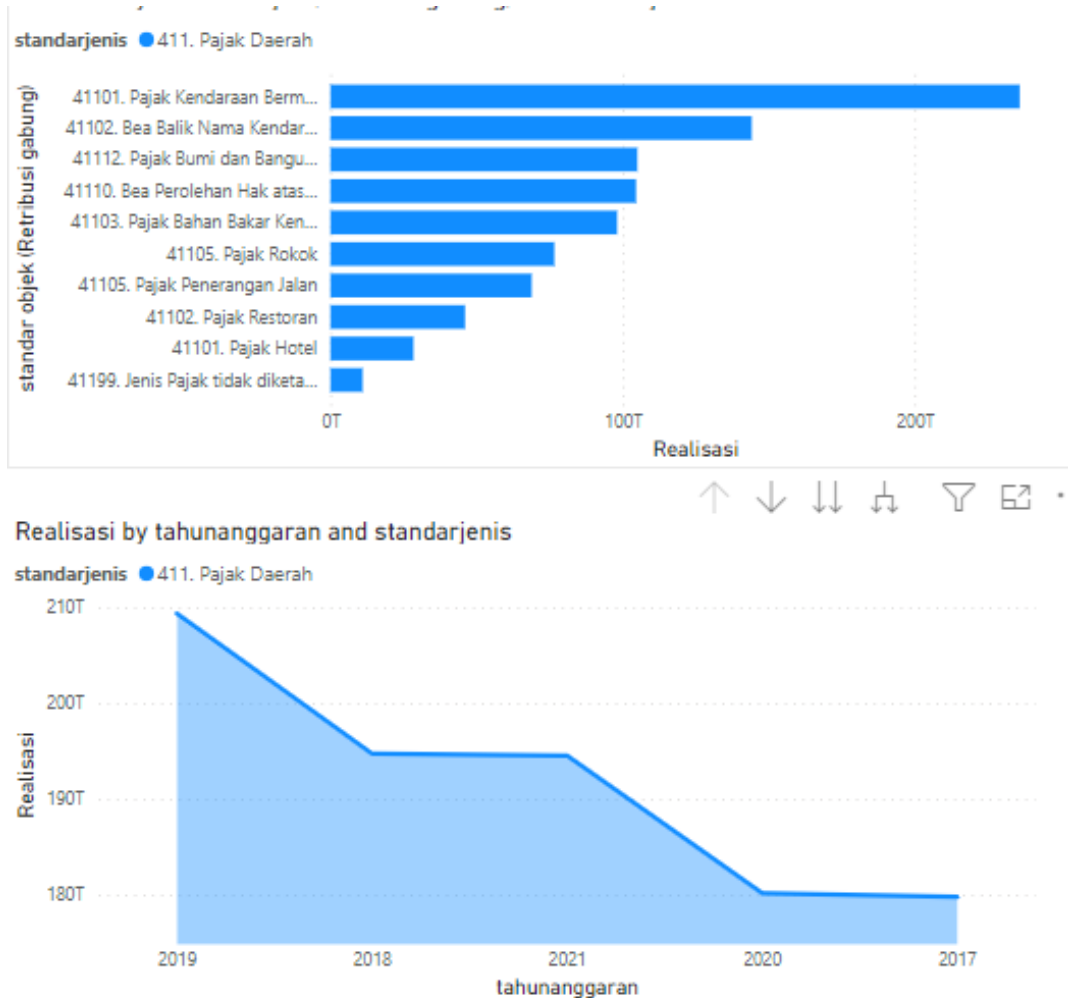
3. Sekitar 25% PAD urban-biased (terkait erat dengan perkotaan, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Penerangan Jalan)



- Pajak Hotel*
- Pajak Restoran*
- Pajak Hiburan*
- Pajak Reklame*
- Pajak Parkir*
- Pajak Penerangan Jalan*
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*
- Pajak Air Tanah*
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*
- Pajak Bumi dan Bangunan*

Secara umum, terdapat potensi besar yang minim *effort*, 54% PAD terkait administrasi perpajakan tanah dan bangunan (BPHTB dan PBB).

4. PAD Indonesia Mundur Tiga Tahun Karena Pandemi



Di luar dugaan, pandemi menyebabkan kemunduruan 3 tahun progress PAD. realisasi PAD di 2020 setara dengan PAD pada 2017 dan PAD di 2021, Meskipun transmisi varian Delta Covid-19 meningkat pesat di Indonesia pada medio 2021, tanda-tanda pemulihan ekonomi makin jelas sehingga perolehan PAD 542 pemda di 2021 naik signifikan dan mencapai angka yang setara dengan PAD 2018.

BAB III

PENUTUP

Ketika BPKP tengah melakukan reformasi pengawasan, tantangan yang harus dipenuhi oleh semua personel pengawasan adalah relevansi kompetensi dan hasil pengawasan internal dengan kebutuhan stakeholder dan dinamika kebijakan publik. Salah satu cara yang tengah dikembangkan dalam pedoman APP OPAD adalah menginternalisasi *conceptual framework* akademis untuk membangun mekanisme pengawasan yang *tailored, generally accepted*, dan dapat dipertanggungjawabkan. BPKP merupakan instansi yang kaya dan memiliki keunggulan kompetitif berupa kesempatan melihat *the big picture*.

Sebagai contoh, dengan melihat data yang ada dan ditambah dimensi sebab-akibat melalui RCA oleh perwakilan, BPKP dapat memberikan *policy recommendation* berupa kerja sama pertukaran informasi dan data dan mekanisme *check-and-balance* Pemda dengan Pertamina (PBB-KB) dan PLN (PPJ). Secara umum, kedua BUMN tersebut membatasi substansi informasi yang dapat diakses Pemda karena alasan kompetisi bisnis dan tidak adanya landasan untuk melakukan tukar data. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi data kedua Pajak Daerah tersebut belum ideal. Selain itu, koordinasi dan debottlenecking, relaksasi, dan integrasi data dengan POLRI dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan untuk memudahkan pembayaran pajak.

Dengan demikian, *Data Analytic*, bersama teknik penulisan ilmiah, dan *storytelling* merupakan sarana yang baik dalam mewujudkan pelaporan hasil pengawasan yang baik. Hasil dari analisis data dan pemahaman *business process* Pemda personel BPKP dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan rekomendasi yang strategis dan makro.